

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Telp. (031) 3095361

Email : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Renja PD sampai Triwulan II Tahun berkenaan, Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan Penutup.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan. Melalui Perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sesuai perkembangan kondisi saat ini.

Bangkalan, 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN


WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan	 6
 Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 25
3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja	
3.2. Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja	26
 Bab IV PENUTUP	 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2022 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024;
- g. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 209 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Tambahan lembaran daerah nomor 76);
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 Seri E);
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 26 Seri E));
- p. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2022 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah

program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja 2022 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 serta evaluasi kinerja di tahun 2021 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2018-2023 dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2022 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6) \times 100$ #DIV/0 !	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4) \times 100$
0.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100 %	100 %	%	%		%	100 %	100
0.00.16.01	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	35 Jenis	21 jenis	jenis	jenis		jenis	21 jenis	60
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	45 Jenis	27 jenis	jenis	jenis		jenis	27 jenis	60

0.00.16.02	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	15 kali 5	45 kali	kali	kali		kali	45 kali	29
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	38 kali 0	12 kali 5	kali	kali		kali	12 kali 5	33
0.00.16.03	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	56 doku men	16 doku men	doku men	doku men		doku men	16 doku men	29
0.00.16.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	20 jenis	19 jenis	jenis	jenis		jenis	19 jenis	95
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	5 Jenis	3 unit	unit	unit		unit	3 unit	60
0.00.16.05	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	5 Jenis	4 Jenis	Jenis	Jenis		Jenis	4 Jeni s	80
		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	2 unit	4 unit	unit	unit		unit	4 unit	200
0.00.16.06	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	40 buah 0	95 buah	buah	buah		buah	95 buah	24
0.00.16.07	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	40 orang	5 orang	orang	orang		orang	5 oran g	13

0.00.16.08	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	14 dokumen	7 dokumen	dokumen	dokumen		dokumen	7 dokumen	0,5
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	10 dokumen	6 dokumen	dokumen	dokumen		dokumen	6 dokumen	60
0.00.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	46 Laporan	24 laporan	laporan	laporan		laporan	24 laporan	52
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	5 Laporan	3 laporan	laporan	laporan		laporan	3 laporan	60
0.00.16.10	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	3 dokumen	3 dokumen	dokumen	dokumen		dokumen	3 dokumen	100
		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran	264 Laporan	66 laporan	laporan	laporan		laporan	66 laporan	25
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 dokumen	3 dokumen	dokumen	dokumen		dokumen	3 dokumen	75

0.00.16.11	Fasilitas peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	9 kegiatan	6 kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	67
1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	14,2 %	10,47 %	%	%	%	%	10 %	73,7
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	320 orang	3692 orang	orang	orang		orang	3.692 orang	1154
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	635 orang	179 orang	orang	orang		orang	179 orang	28
1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	199 orang	36 orang	orang	orang		orang	36 orang	18
1.06.01.23	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2,9 %	0,5 %	%	%	%	%	1 %	17,2
1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	663 orang	120 orang	orang	orang		orang	120 orang	18
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.482 orang	14.553 orang	orang	orang		orang	14.553 orang	418

		Dokumen penerima rastra	5 dokumen	3 dok	dok	dok		dok	3 dok	60
1.06.01.23.02	Kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	5 lokasi	3 lokasi	lokasi	lokasi		lokasi	3 lokasi	60
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	10 kegiatan	6 keg	keg	keg		keg	6 keg	60
1.06.01.23.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	28 lembaga	0 yayasan	0 yayasan	0 yayasan		yayasan	0 yayasan	0
		Jumlah TSKS yang terbina	18 orang	18 orang	orang	orang		orang	18 orang	100
1.06.01.24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	%	%	%	%	100 %	100
1.06.01.24.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	100 %	100 %	%	%		%	100 %	100
		Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	445 desa	136 desa	desa	desa		desa	136 desa	31
1.06.01.24.02		Dokumen penerima KPM	5 dokumen	3 dok	dok	dok		dok	3 dok	60

	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data kemiskinan	5 doku men	3 dok	dok	dok		dok	3 dok	60
1.06.01.24.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	10 % 0	10 % 0	%	%		%	10 % 0	100
1.06.01.25	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6 %	6 %	%	%		%	6 %	100
1.06.01.25.01	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	28 lemb ga	5 lemb ga	lemb ga	lemb ga		lemb ga	5 lemb aga	18
1.06.01.25.02	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang telah dibina	27 or ang	18 or ang	orang	orang		orang	18 or ang	65
1.06.01.25.03	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	11 or ang	70 or ang	orang	orang		orang	70 or ang	64
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020										
1.06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	10 % 0		%	%		10 % 0	%	

1.06.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	10 0	%	%	10 0	%	10 0	%	100	10 0	%	10 0	%	100
1.06.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9	doku men	doku men	3	doku men	3	doku men	100	2	doku men	5	doku men	55,56
1.06.01. 2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	6	doku men	doku men	2	doku men	2	doku men	100	1	doku men	3	doku men	50,00
1.06.01. 2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun	6	doku men	doku men	2	doku men	2	doku men	100	1	doku men	3	doku men	50,00
1.06.01. 2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	doku men	doku men	1	doku men	1	doku men	100	1	doku men	2	doku men	66,67
1.06.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Lapor an	Lapor an	8	Lapor an	8	Lapor an	100	8	Lapor an	16	Lapo ran	66,67

1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	49 orang/bulan	orang/bulan	49 orang/bulan	49 orang/bulan	100	49 orang/bulan	98 orang	200,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 laporan	laporan	0 laporan	0 laporan	#DIV/0!	1 laporan	1 laporan	50,00
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	2 Laporan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	1 Laporan	1 Laporan	50,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	66,67
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran	198 laporan	laporan	66 laporan	66 laporan	100	66 laporan	132 laporan	66,67
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100	14	Laporan	28	Laporan	66,67
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100
1.06.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270	buah	buah	90	buah	90	buah	100	90	buah	180	buah	66,67
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	14	Laporan	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	90	Laporan	90	Laporan	642,86
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	24	Laporan	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	12	Laporan	12	Laporan	50,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100	%	%	100	%	100	%		100	%	200	%	200

1.06.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 unit 2	unit	44 unit	41 unit	93,18	72 unit	11 unit 3	85,61
1.06.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57 unit	unit	0 unit	0 unit	#DIV/0 !	19 unit	19 unit	33,33
1.06.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49 unit 5	unit	16 unit 5	15 unit 5	93,94	17 unit 0	32 unit 5	65,66
1.06.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 jenis	jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	8 jenis	66,67
1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 jenis	jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	4 jenis	66,67
1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6 jenis	jenis	1 jenis	1 jenis	100	2 jenis	3 jenis	50,00
1.06.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 kali	kali	0 kali	0 kali	#DIV/0 !	25 kali	25 kali	50,00
1.06.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 kali 0	kali	1 kali	1 kali	100	11 kali 0	11 kali 1	33,64

1.06.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0 !	1 Laporan	1 Laporan	50,00
1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.06.01. 2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	39 unit	unit	26 unit	26 unit	100	62 unit	88 unit	225,64
1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.06.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	jenis	2 jenis	2 jenis	100	0 jenis	2 jenis	100,00
1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 jenis	jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	6 jenis	66,67

1.06.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	0 Jenis	2 Jenis	100,00
1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 jenis	jenis	4 jenis	4 jenis	100	3 jenis	7 jenis	77,78
1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.06.01. 2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 unit	unit	2 unit	2 unit	100	1 unit	3 unit	25,00
1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	76 unit	unit	17 unit	17 unit	100	19 unit	36 unit	47,37
1.06.01. 2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	8 unit	unit	0 unit	0 unit	#DIV/0 !	4 unit	4 unit	50,00

1.06.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!	1 unit	1 unit	25,00
1.06.01. 2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	19 unit 7	unit	17 unit	10 unit	58,823 52941	63 unit	73 unit	37,06
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	29 %	%	14 %	7, 69 %	54,93	19 %	26, 69 %	92,03
1.06.02. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	29 %	%	14 %	7, 69 %	54,93	19 %	26, 69 %	92,03
1.06.02. 2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang dibina	18 orang	orang	18 orang	18 orang	100	18 orang	18 orang	100,00

1.06.02. 2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	5 laporan	laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	40,00
1.06.02. 2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	12 lembaga	lembaga	6 lembaga	6 lembaga	100	20 lembaga	26 lembaga	216,67
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	%	2,8 %	0,16 %	5,714285714	5 %	5,16 %	5,16
1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	200 orang	orang	orang	orang	#DIV/0!	450 orang	45 orang	225

	Luar Panti Sosial									
1.06.04. 2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing	27 orang 9	orang	64 orang	64 orang	100	35 orang 0	41 orang 4 g	148,39
		Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang dibimbing	15 orang 0	orang	40 orang	40 orang	100	10 orang 0	14 orang 0 g	93,33
1.06.04. 2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	3 dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	66,67
1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	%	127 %	27 %	21,26	100 %	127 %	127

1.06.04. 2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	40 orang 5	orang	12 orang 7	27 orang	21,26	40 orang	67 orang	16,54
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	200 %	200
1.06.05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100 %	%	%	%	#DIV/0 !	100 %	100 %	100
1.06.05. 2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	59 orang 40	orang	82 orang 31	75 orang 21	91,37	79 orang 93	15. orang 51 g 4	261,18
1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	5 dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40,00
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PKH	6 Laporan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0 !	1 Laporan	1 Laporan	16,67

1.06.06	Program Penanganan Bencana	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	%	100 %	100 %	100	%	%	
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	% korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00
		persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100 %	%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 orang	orang	25 orang	25 orang	100	30 orang	30 orang	100,00

1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100	%	%	%	%	#DIV/0!	%	%	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100	%	%	100	%	100	100	%	100
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1	Lokasi	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100	100,00
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	6	kegiatan	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100	66,67

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Sosial

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2022	Perubahan			2022	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS	501.468	501.468	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	10,04	10,04	
				Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	19	19	
Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	83	83	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	

Tabel 3.2
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA 2022					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022						
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	+ / - Anggaran	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
1.06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Dinsos	100%	6.350.633.373	DAUM	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	6.114.913.205	DAUM	- 235.720.168	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	Dinsos	100%	16.702.600	DAUM	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana		100%	16.702.600	DAUM	0	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinsos	2 dokumen	4.941.550	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		2 dokumen	4.941.550	DAUM	0	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dinsos	1 dokumen	3.959.200	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 dokumen	3.959.200	DAUM	0	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dinsos	1 dokumen	2.941.200	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 dokumen	2.941.200	DAUM	0	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dinsos	1 dokumen	2.166.500	DAUM	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 dokumen	2.166.500	DAUM	0	

1.06.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinsos	8 laporan	2.694.150	DAUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	2.694.150	DAUM	0	
1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinsos	100%	4.127.850.298	DAUM	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3.930.799.145	DAUM	-197.051.153	
1.06.01.2.0 2.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Dinsos	49 orang/bulan	4.114.003.598	DAUM	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	49 orang/bulan	3.916.952.445	DAUM	-197.051.153	
1.06.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	1 laporan	2.954.300	DAUM	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	2.954.300	DAUM	0	
1.06.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	Dinsos	1 laporan	3.719.850	DAUM	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 laporan	3.719.850	DAUM	0	
1.06.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dinsos	1 dokumen	3.955.050	DAUM	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	3.955.050	DAUM	0	
1.06.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	Dinsos	66 laporan	3.217.500	DAUM	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	66 laporan	3.217.500	DAUM	0	
1.06.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	Dinsos	100%	1.461.500	DAUM	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	100%	1.503.500	DAUM	42.000	
1.06.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinsos	14 laporan	1.461.500	DAUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	1.503.500	DAUM	42.000	
1.06.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Dinsos	100%	17.841.400	DAUM	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	17.841.400	DAUM	0	
1.06.01.2.0 5.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	90 buah	14.938.000	DAUM	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 buah	14.938.000	DAUM	0	

1.06.01.2.0 5.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	Dinsos	7 Laporan	1.132.000	DAUM	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	7 Laporan	1.132.000	DAUM	0	
1.06.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	Dinsos	12 Laporan	1.771.400	DAUM	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	12 Laporan	1.771.400	DAUM	0	
1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	Dinsos	100%	315.954.775	DAUM	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100%	312.976.175	DAUM	-2.978.600	
1.06.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	72 unit	3.495.500	DAUM	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 unit	3.495.500	DAUM	0	
1.06.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	19 unit	61.794.675	DAUM	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 unit	61.794.675	DAUM	0	
1.06.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	170 unit	5.009.000	DAUM	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	170 unit	5.009.000	DAUM	0	
1.06.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	4 jenis	60.632.000	DAUM	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 jenis	61.432.000	DAUM	800.000	
1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	2 jenis	22.960.600	DAUM	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	22.960.600	DAUM	0	
1.06.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	2 jenis	12.240.000	DAUM	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	15.520.000	DAUM	3.280.000	
1.06.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	25 kali	11.220.000	DAUM	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 kali	6.368.000	DAUM	-4.852.000	
1.06.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	110 kali	83.403.000	DAUM	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 kali	90.096.400	DAUM	6.693.400	

1.06.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	Dinsos	1 laporan	55.200.000	DAUM	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun		1 laporan	46.300.000	DAUM	-8.900.000	
1.06.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Dinsos	100%	226.767.30 0	DAUM	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana		100%	228.175.30 1	DAUM	1.408.001	
1.06.01.2.0 7.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	Dinsos	62 unit	226.767.30 0	DAUM	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		62 unit	228.175.30 1	DAUM	1.408.001	
1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	Dinsos	100%	1.163.165.5 00	DAUM	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana		100%	1.126.343.6 44	DAUM	- 36.821.856	
1.06.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	3 jenis	90.828.000	DAUM	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 jenis	94.714.560	DAUM	3.886.560	
1.06.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	3 jenis	1.072.337.5 00	DAUM	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 jenis	1.031.629.0 84	DAUM	- 40.708.416	
1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	Dinsos	100%	480.890.00 0	DAUM	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana		100%	480.571.44 0	DAUM	-318.560	
1.06.01.2.0 9.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Dinsos	1 unit	156.000.00 0	DAUM	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		1 unit	156.000.00 0	DAUM	0	
1.06.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Dinsos	19 unit	264.470.00 0	DAUM	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		19 unit	230.870.00 0	DAUM	- 33.600.000	

1.06.01.2.0 9.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Dinsos	4 unit	1.420.000	DAUM	Jumlah Mebel yang dipelihara		4 unit	1.420.000	DAUM	0	
1.06.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinsos	1 unit	30.000.000	DAUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 unit	63.281.440	DAUM	33.281.440	
1.06.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	63 unit	29.000.000	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		63 unit	29.000.000	DAUM	0	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil	Bangkalan	19%	473.636.700	DAUM	% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil		19%	471.436.700	DAUM	-2.200.000	
1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu	Bangkalan	19%	473.636.700	DAUM	% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu		19%	471.436.700	DAUM	-2.200.000	
1.06.02.2.0 3.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	Bangkalan	18 orang	146.016.700	DAUM	Jumlah TKSK yang dibina		18 orang	146.016.700	DAUM	0	
1.06.02.2.0 3.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	Bangkalan	1 dokumen	107.336.000	DAUM	Laporan hasil monitoring		1 dokumen	107.336.000	DAUM	0	
1.06.02.2.0 3.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	Bangkalan	20 lembaga	220.284.000	DAUM	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu		11 lembaga	218.084.000	DAUM	-2.200.000	

1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bangkal an	100%	2.472.168.344	DAUM	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	1.450.467.959	DAUM	- 1.021.700.385	
1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bangka lan	450 orang	2.421.831.994	DAUM	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		746 orang	1.397.886.509	DAUM	- 1.023.945.485	
1.06.04.2.0 1.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing	Bangkal an	350 orang	1.705.217.544	DAUM	Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing		246 orang	694.912.000	DAUM	- 1.010.305.544	
		Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang dibimbing		100 orang			Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang dibimbing		500 orang			0	
1.06.04.2.0 1.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	Bangkal an	1 dokume n	716.614.450	DAUM	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)		1 dokume n	702.974.509	DAUM	- 13.639.941	
1.06.04.2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bangka lan	40 orang	50.336.350	DAUM	% Keluarga Tuna Sosial yang difasilitasi		40 orang	52.581.450	DAUM	2.245.100	

1.06.04.2.0 2.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	Bangka lan	40 orang	50.336.350	DAUM	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing		40 orang	52.581.450	DAUM	2.245.100	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	% keluarga fakmis yang terlindungi dan memiliki jaminan sosial	Bangka lan	100%	1.988.675.4 75	DAUM	% keluarga fakmis yang terlindungi dan memiliki jaminan sosial		100%	1.673.818.0 75	DAUM	- 414.857.40 0	
1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	Bangka lan	100%	1.988.675.4 75	DAUM	% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi		100%	1.673.818.0 75	DAUM	- 414.857.40 0	
1.06.05.2.0 2.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Bangka lan	7993 orang	1.196.450.7 50	DAUM	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial		3296 orang	758.778.75 0	DAUM	- 437.672.00 0	
1.06.05.2.0 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Bangka lan	1 dokume n	792.224.72 5	DAUM	Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)		1 dokume n	892.224.72 5	DAUM	0	
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PKH		1 laporan			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PKH		1 laporan			0	
1.06.05.2.0 2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Bangka lan		0		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Keluarga	22.814.600	DBHC HT	22.814.600	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bangka lan	100%	1.308.547.9 00	DAUM	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	911.047.90 0	DAUM	- 297.500.00 0	
1.06.06.2.0 1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	% korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	Bangka lan	100%	1.081.354.3 50	DAUM	% korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya		100%	683.854.35 0	DAUM	- 297.500.00 0	
1.06.06.2.0 1.01	Penyediaan makanan	persentase korban bencana alam yang di fasilitasi	Bangka lan	100%	1.081.354.3 50	DAUM	persentase korban bencana alam yang di fasilitasi		100%	683.854.35 0	DAUM	- 297.500.00 0	

		persentase korban bencana sosial yang difasilitasi		100%			persentase korban bencana sosial yang difasilitasi		100%			0	
1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	Bangka lan	100%	227.193.55 0	DAUM	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi		100%	227.193.55 0	DAUM	0	
1.06.06.2.0 2.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Bangka an	30 orang	227.193.55 0	DAUM	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		30 orang	227.193.55 0	DAUM	0	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Bangka an	100%	184.437.30 0	DAUM	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola		100%	142.430.00 0	DAUM	- 42.007.300	
1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	% Taman Makam Pahlawan terpelihara	Bangka lan	100%	184.437.30 0	DAUM	% Taman Makam Pahlawan terpelihara		100%	142.430.00 0	DAUM	- 42.007.300	
1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	Bangka lan	1 lokasi	138.790.00 0	DAUM	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara		1 lokasi	128.790.00 0	DAUM	- 10.000.000	
1.06.07.2.0 1.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	Bangka an	2 kegiatan	45.647.300	DAUM	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional		2 kegiatan	13.640.000	DAUM	- 32.007.300	
	JUMLAH				12.778.099. 092					10.764.113. 839			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang terutama dengan adanya dampak dari kenaikan BBM maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2022 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PMKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk

penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PMKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksese-eksese yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan ini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2022 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022.

Bangkalan, 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 197301261993021001